

Nomor : 248/MTI/PD-DIR /XII/2019
Lampiran : 1 rangkap

Jakarta, 31 Desember 2019

Kepada Yth.

- 1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Sawah Besar
Jakarta Pusat, 10710
- 2. Kepala Divisi Penilai Perusahaan Grup 3
PT Bursa Efek Indonesia**
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan, 12190

**Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Keterbukaan Informasi Publik Adanya Kejadian
Yang Menyebabkan Bertambahnya Kewajiban Keuangan PT Mora
Telematika Indonesia ("Perseroan").**

Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan PT Bursa Efek Surabaya (Saat ini menjadi Bursa Efek Indonesia) Nomor I.A.3 tentang Kewajiban Pelaporan Emiten (untuk selanjutnya disebut "IDX IA3"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 7"); Ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 nomor 65 tanggal 25 September 2017 beserta perubahan-perubahannya ("PWA OB"); dan Ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2017 nomor 9 tanggal 1 April 2019 beserta perubahan-perubahannya ("PWA SI").

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan IDX IA3, POJK 31, POJK 7, PWA OB, dan PWA SI, dan sehubungan dengan adanya kejadian yang menyebabkan bertambahnya kewajiban Keuangan Perseroan yang mana informasi tersebut sebelumnya telah disampaikan secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor 247/MTI/PD-DIR/XII/2019 pada tanggal 30 Desember 2019 ("**Keterbukaan Informasi Perseroan**"), bersama surat ini sampaikan bahwa kami telah mengumumkan Keterbukaan Informasi Perseroan dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional yaitu Harian Ekonomi Neraca halaman 6 tertanggal 31 Desember 2019.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan apabila terdapat informasi yang dibutuhkan mengenai surat ini mohon dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan a/n Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078 – henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@moratelindo.co.id).

Hormat kami,

PT Mora Telematika Indonesia



Jimray Kadir
Wakil Direktur Utama

Tembusan :

1. Yth. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Obligasi;
2. Yth. PT Bank Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah; dan
3. Yth. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
4. Yth. PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.

MAKRO

RUU Omnibus Law Diklaim Telah Ramah Investasi

NERACA

Jakarta - Semua aturan perundangan yang dinilai menghambat masuknya investasi ke Indonesia sudah diakomodasi dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang merupakan usulan Presiden Joko Widodo untuk mensinkronkan sejumlah undang-undang agar ramah investasi.

"Jika BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) beranggapan masih ada undang-undang dan aturan di bawahnya yang menghambat investasi, sebaiknya dilaporkan ke tim yang menggodok draft RUU Omnibus Law. Aturan yang mana? undang-undang apa dan pasal berapa?," kata Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Subagyo, melalui pernyataan tertulisnya yang diterima, Senin (30/12).

Firman Subagyo mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, yang menyebut masih ada undang-undang dan aturan perundangan lainnya yang menghambat investasi. Menurut Firman, Tim Penyusun RUU Omnibus Law ini dikordinasikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. "Kepala BKPM bisa langsung berkoordinasi dengan tim, sebab semua aturan yang dinilai menghambat investasi sudah dikumpulkan," katanya.

Pembahasannya, kata dia, akan dilakukan pada awal tahun 2020 setelah RUU Omnibus Law ini disampaikan oleh Pemerintah ke DPR RI. Politisi senior Partai Golkar ini sejak awal ditugaskan oleh Menko Perekonomian selaku Ketua umum Partai Golkar untuk mengawal pembahasan RUU Omnibus Law ini di DPR. "Sebaiknya kita tidak menyampaikan pernyataan yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat terkait aturan perundangan yang dinilai menghambat investasi itu. Kita tunggu pembahasannya di DPR RI," katanya.

Sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan undang-undang yang menghambat investasi itu ada pada kewenangan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). KLHK bermitra dengan Komisi IV DPR RI. Firman yang juga pimpinan Komisi IV DPR RI menegaskan, investasi itu hendaknya tidak menghalalkan segala cara, khususnya terkait dengan KLHK, karena terkait tiga hal yakni faktor ekonomi, ekologi, dan sosial.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menargetkan omnibus law yang terdiri atas dua Undang-Undang (UU) besar yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Perpajakan dapat dibahas di DPR pada Januari 2020.

"Kita akan selesaikan dan kita akan masukkan pada Januari (2020). Kebetulan Prolegnas (program legislasi nasional) tertunda pengesahannya kemarin, maka setelah prolegnas, seminggu setelah DPR bersidang maka kami akan mengajukan rencana UU omnibus law Cipta Lapangan Kerja dan ketentuan-ketentuan Perpajakan," kata Yasonna. @bari

Pembangunan Kilang Mestinya Terintegrasi dengan Petrokimia

NERACA

Jakarta - Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) merekomendasikan kepada PT Pertamina (Persero) untuk membangun kilang minyak yang terintegrasi dengan industri petrokimia. Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin di Jakarta, Senin (30/12), mengatakan dengan adanya kilang terintegrasi tersebut maka bisa menekan impor BBM, sebab kualitas bahan bakar nantinya akan lebih baik.

Diadopsinya biofuel B30 dan BE10 dinilai Ahmad, belum bisa maksimal dalam melepaskan diri dari kebutuhan impor BBM, sebab secara kuantitas dan kualitas dari keseluruhan kilang Pertamina masih terkonsentrasi untuk bahan bakar fosil. Di sisi lain buruknya kualitas BBM telah berdampak pada pencemaran udara dan emisi rumah kaca di berbagai kota yang diikuti oleh dampak kesehatan, ekonomi dan sosial.

Imbas dari masih buruknya kualitas BBM di Indonesia adalah menjadi lambat penyerapan teknologi untuk meningkatkan standar emisi taraf internasional. Dari kualitas kilang tersebut menurut Ahmad, bisa dijadikan patokan dalam penetapan harga. Sebelumnya, Pertamina menasar peluang pasar Rp50 triliun dengan mengembangkan area kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menjadi pusat industri petrokimia yang terintegrasi dengan kilang nasional.

Nicke Widyawati selaku Dirut Pertamina menyatakan peluang pasar bisnis petrokimia di Indonesia sekitar Rp40 - 50 triliun per tahun. @bari



MENTERI PERHUBUNGAN MENINJAU JALUR PUNCAK BOGOR : Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) didampingi Bupati Bogor Ade Yasin (keempat kanan) meninjau jalur Puncak di Bogor, Jawa Barat, Senin (30/12/2019). Jelang tahun baru 2020, Menteri Budi Karya Sumadi mengecek kesiapan jalur wisata dan rekyasa lalu lintas di Jalur Puncak Bogor.

Kuota BBM Bersubsidi 2020 Berpotensi Jebol

Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan bahwa terdapat potensi kelebihan kuota untuk jenis BBM bersubsidi pada tahun 2020 sebesar 700.000 kiloliter (kl). Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menyebutkan sesuai dengan Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2020, kuota untuk jenis BBM tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi sebesar 15,87 juta kl, terdiri dari minyak solar 15,31 juta kl dan minyak tanah sebesar 0,56 juta kl. Kuota ini mengalami kenaikan sebesar 5,03 persen dari kuota BBM tahun 2019 sebesar 15,11 juta kl.

■ NERACA

"Kalau mengacu pada realisasi 2019, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang sama pada 2020, akan terjadi potensi over kuota tahun 2020. Asumsinya ada potensi kelebihan 700.000 kl," kata Fanshurullah dalam Penyerahan

SK Kuota BBM Subsidi di Kantor BPH Migas Jakarta, Senin (30/12).

Fanshurullah menjelaskan bahwa dalam realisasi BBM Subsidi 2019, terdapat kelebihan kuota per 29 Desember 2019 sebesar 1,28 juta kl untuk solar dan 0,5 juta kl untuk premium atau senilai Rp3 triliun.

Selain BBM subsidi, hal yang sama juga terjadi pada jenis BBM khusus penugasan (JBKP) atau penugasan premium. Terdapat kelebihan kuota untuk BBM penugasan sebesar 500.000 kl, dari kuota yang ditetapkan sebesar 11 juta kl.

Menurut dia, kelebihan kuota ini salah satunya disebabkan karena masih banyaknya penyimpangan penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Ada pun sejumlah daerah yang mengalami realisasi kuota yang berlebih, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan wilayah Sulawesi. "Kami berharap agar Pertamina maupun badan usaha BBM lainnya untuk dapat mendistribusikan BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume," kata dia.

Adapun penerima penugasan penyaluran BBM subsidi diberikan kepa-

da beberapa badan usaha yakni PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelni (Persero), Perintis PT Pelni (Persero) atau PELRA dan PT KAI (Persero). Tahun 2020, Pertamina mendapatkan kuota solar sebanyak 15,07 juta kl, premium sebanyak 11 juta kl dan minyak tanah 560 ribu kl. Kepada AKR Corporindo, pemerintah menugaskan distribusi BBM subsidi jenis solar sebanyak 234 ribu kl.

Sementara untuk tiga badan usaha lainnya, BBM bersubsidi jenis solar akan diberikan tiap 3 bulan. Total yang akan didapat dalam selam satu tahun yaitu PT Pelni sebanyak 96.343 kl, PT KAI 51.250 kl, dan Asosiasi PELRA 16 ribu kl. Sementara gabungan PT ASDP, Asosiasi GAPASDA dan INFA sebesar 61.970 kl. @bari

HADAPI MUSIM HUJAN

Pemerintah Pastikan Stok Bantuan Bencana Aman

NERACA

Jakarta - Menteri Sosial Juliari P Batubara mematkan stok bantuan untuk penanganan korban bencana alam aman menghadapi musim penghujan. "Kesiapsiagaan terhadap bencana alam akan terditingkatkan.

Kita pastikan bahwa stok bantuan bahan makanan, tenda dan lainnya dalam level yang aman," kata

Mensos di Jakarta, Senin (30/12).

Selain itu, ujar Mensos, seluruh relawan sosial terutama Taruna Siaga Bencana (Tagana) juga digerakkan untuk membantu masyarakat yang menjadi korban.

Menurut Juliari, Kemensos akan tetap memberikan perhatian terhadap masyarakat yang terdampak bencana sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo agar pemerintah selalu hadir.

Kementerian Sosial menyiapkan sebanyak 306.139 kilogram beras reguler untuk pemenuhan kebutuhan bagi korban dalam upaya penanggulangan bencana menghadapi musim peng-

hujan. Selain itu juga disiapkan family kit, peralatan makan, paket alat dapur, sandang dan selimut juga perlengkapan Tagana.

Sejak sebulan terakhir sejumlah daerah di Tanah Air mengalami berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor akibat curah hujan yang tinggi.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), memprediksi puncak musim hujan akan terjadi pada Bulan Januari dan Februari 2020.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meng-sulkan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan status siaga darurat. Hal itu seperti dikatakan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo. "Kita mengadakan rapat koordinasi nasional di Jakarta mengumpulkan seluruh jajaran pemerintah daerah, TNI dan Polri untuk mendiskusikan tahap antisipasi apa saja. Selain itu kita menyarankan kepada mereka untuk segera menyatakan status siaga darurat," ujar Agus, pekan kemarin. @bari

Sejak sebulan terakhir sejumlah daerah di Tanah Air mengalami berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor akibat curah hujan yang tinggi.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), memprediksi puncak musim hujan akan terjadi pada Bulan Januari dan Februari 2020.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meng-sulkan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan status siaga darurat. Hal itu seperti dikatakan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo. "Kita mengadakan rapat koordinasi nasional di Jakarta mengumpulkan seluruh jajaran pemerintah daerah, TNI dan Polri untuk mendiskusikan tahap antisipasi apa saja. Selain itu kita menyarankan kepada mereka untuk segera menyatakan status siaga darurat," ujar Agus, pekan kemarin. @bari

Pemerintah Masih Hitung Tarif KA Bandara Adi Soemarno

NERACA

Jakarta - Pemerintah masih menghitung besaran tarif kereta api (KA) bandara, yang menghubungkan Stasiun Solobalapan dengan Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah. "Sekarang masih digratiskan sampai dua bulan, sesuai dengan permintaan Pak Menteri (Menhub Budi Karya Sumadi)," kata Direktur Utama PT KAI (Persero) Edi Sukmoro di sela soft launching KA bandara di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Ia mengatakan selama gratis tersebut PT KAI dan PT Angkasa Pura akan melakukan rapat untuk menentukan tarif KA bandara. "Belum ada perkiraan juga, perlu hitung semuanya dulu. Ini kan gabungan antara AP I dengan KAI, yang penting tarif terjangkau," katanya.

Sementara itu, meski gratis, setiap orang yang akan menaiki KA bandara harus memperoleh tiket. "Kapasitas maksimal 150 persen, misalnya kapasitas 200 penumpang, maka maksimal bisa membawa 300 penumpang. Ini semuanya harus mengantongi tiket, kalau permintaan lebih dari itu, sudah berhenti tiketnya," katanya.

Ia mengatakan saat ini pengoperasian KA bandara masih menggunakan dua rangkaian kereta api. Ke depan, akan ada tambahan jumlah kereta sesuai kebutuhan.

Mengenai jumlah perjalanan, dikatakannya, akan dilakukan sebanyak 60 kali perjalanan, yaitu 30 kali menuju bandara dan 30 kali sebaliknya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan perjalanan dari Stasiun Solobalapan menuju Bandara Adi Soemarmo membutuhkan waktu selama 19 menit.

"Ini untuk mempermudah penumpang bandara yang sudah kami lakukan di Medan, Palembang, Padang, dan Jakarta. Solo ini kelima, namun yang istimewa di Solo ini langsung masuk bandara," katanya.

Ia berharap fasilitas tersebut juga akan mendorong sektor pariwisata, khususnya Borobudur, Magelang, yang akan menjadi Bali Baru Indonesia. "Jawa Tengah punya Borobudur, ketika ada alat transportasi yang terhubung antara Solo, Semarang, Jogja, bahkan hingga Cirebon, maka orang gampang kalau mau ke Borobudur," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan fasilitas ini membuat penumpang melakukan perjalanan lebih cepat. "Insya Allah, tahun depan Pak Menhub bantu kami mempercepat pembangunan bandara di Purbalingga. Begitu itu on, KA on maka terintegrasi pariwisata yang cukup bagus," katanya.

Sebelumnya, General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Adi Soemarmo Abdullah Usman menyampaikan Kereta Api Bandara yang akan menghubungkan Stasiun Solobalapan-Bandara Adi Soemarmo siap beroperasi 20 Desember 2019 seiring selesainya pengerjaan proyek tersebut. "Kalau peresmian tanggal 24 Desember 2019, rencananya akan dihadiri Pak Jokowi," katanya.

Ia mengatakan nantinya akan ada dua rangkaian kereta yang beroperasi sebagai KA Bandara. Keduanya diperkirakan akan datang bergantian setiap 19 menit. "Jadwalknya juga akan disesuaikan dengan kedatangan dan keberangkatan pesawat. Mulai beroperasi sejak pukul 04.00 WIB karena pesawat paling pagi pukul 06.55 WIB," katanya.

Untuk mempermudah pengguna jasa, pihaknya akan menyediakan loket untuk check in di Stasiun Solobalapan sehingga penumpang yang turun dari kereta sudah langsung bisa check in di stasiun.

"Akan ada empat tempat check in yang kami sediakan, tiga di antaranya ada di bandara dan satu disediakan di Stasiun Balapan," katanya. Sedangkan untuk harga tiket KA bandara ini nanti akan dipatok Rp10.000-15.000/penumpang. Ia juga mengatakan perjalanannya KA Bandara ini akan singgah di Stasiun Kadipiro. @bari

Catatan untuk BPJS Kesehatan

NERACA

Jakarta - Pemerintah telah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memberikan banyak manfaat, namun masih ada beberapa catatan yang harus diperbaiki dalam program tersebut. Hal itu seperti disampaikan oleh lembaga swadaya pengawas asuransi kesehatan sosial BPJS Watch.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengakui bahwa JKN sudah memberikan manfaat kepada bangsa Indonesia dengan utilitas yang terus meningkat dari tahun ke tahun baik rawat inap maupun rawat jalan. Namun, menurut dia, JKN masih memiliki banyak masalah di 2019 ini seperti masalah kepesertaan, pelayanan, dan pembiayaan.

Hal pertama yang menjadi catatan adalah jumlah kepesertaan yang tidak mencapai target cakupan kepesertaan semesta atau UHC (Universal Health Coverage) yaitu minimal 95 persen penduduk Indonesia sudah tercapai JKN pada akhir 2019. "Per tanggal 13 Desember 2019 lalu saja kepesertaan hanya mencapai 224.133.671 jiwa, artinya ada sekitar 30 juta rakyat Indonesia yang gagal direkrut menjadi peserta JKN untuk memenuhi target UHC kepesertaan tersebut," katanya.

Masalah kepesertaan lain yang menjadi sorotan adalah masih adanya rakyat miskin yang belum memiliki JKN dan adanya masyarakat mampu yang termasuk dalam peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dikarenakan masalah kevalidan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kementerian Sosial.

Hasil audit BPKP terhadap laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun APB 2018 menyebutkan terdapat 27,4 juta kepesertaan PBI APBN yang bermasalah. @bari



KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PT Mora Telematika Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") dengan ini menyampaikan informasi kepada publik bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menandatangani Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Sri Hidiangsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan Penerimaan Fasilitas Kredit Term Loan sebesar Rp. 856.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh enam miliar Rupiah), dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.

Sehubungan dengan Perjanjian Kredit tersebut, perlu disampaikan juga hal-hal sebagai berikut:

- Jaminan atas Perjanjian Kredit yaitu rekening giro escrow atas nama Perseroan yang akan diikat gadai sebesar Rp. 856.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh enam miliar Rupiah);
- Penerimaan fasilitas kredit tersebut masih memenuhi ketentuan rasio keuangan yang diijinkan sesuai dengan laporan keuangan audited periode 31 Desember 2018, sehingga memenuhi pengecualian Pinjaman dan Agunan yang diijinkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalimaman Obligasi dan Perjanjian Perwalimaman Sukuk Ijarah Perseroan.

Informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi merupakan informasi yang diungkapkan Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Jakarta, 31 Desember 2019
PT Mora Telematika Indonesia
 Direksi

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan pasal 147 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT. TELEVISI ANAK NEGERI berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"). Dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan akta tertanggal 17 Desember 2019 nomor 03 yang dibuat di hadapan SYLVIA IRAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, PT. TELEVISI ANAK NEGERI berkedudukan di Jakarta Pusat, yang beralamat di Gedung Citylofts-Citywalk Sudirman, Jalan Kyai Mas Mansyur nomor 121, lantai 17 unit 23, telah dibubarkan.

Sehubungan hal tersebut kami, DIREKSI, selaku Likuidator Perseroan, memanggil para Debitor dan Kreditor Perseroan untuk menyelesaikan tagihan-tagihan/hutang-hutangnya ke kantor Perseroan, beralamat di Gedung Citylofts-Citywalk Sudirman, Jalan Kyai Mas Mansyur nomor 121, lantai 17 unit 23 selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal pengumuman ini. Setelah lewat batas waktu tersebut PT. TELEVISI ANAK NEGERI tidak bertanggung jawab lagi atas sesuatu penagihan & tuntutan berupa apapun.

Jakarta, 31 Desember 2019
 Ttd
 Direksi

PENGUMUMAN

Berdasarkan rencana Para Pemegang Saham **PT. TRANSINDO QUATTRO AVIASI**, berkedudukan di Jakarta Utara yang akan mengalihkan sebagian besar saham-sahamnya dalam Perseroan (Akuisisi) kepada Pihak Lain dan karenanya sehubungan dengan rencana tersebut guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUP"), maka bagi para kreditor Perseroan yang berkeberatan dapat menyampaikan konfirmasi tertulis kepada Direksi Perseroan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini, setelah batas waktu tersebut Perseroan tidak bertanggung jawab lagi atas suatu tagihan dan/atau tuntutan apapun

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat menjadi maklum adanya.

Jakarta, 31 Desember 2019.
PT. TRANSINDO QUATTRO AVIASI
 TTD
 Direksi

PENGUMUMAN LIKUIDATOR PT AON HEWITT INDONESIA berkedudukan di Jakarta Selatan ("PERSEROAN")

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT AON HEWITT INDONESIA, akta nomor 05, tanggal 16 Desember 2019, dibuat di hadapan Andriana Febyanti, S.H., Notaris Pengganti dari Kanya Candrika Katrini, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi. Para Pemegang Saham Perseroan telah mengambil keputusan-keputusan, antara lain:

- Menyetujui pembubaran dan likuidasi Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam hukum Perseroan di Indonesia; dan
- Memutuskan menunjuk Tuan Leonard Mamahit, dengan alamat Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 27, Suite 2703, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, untuk bertindak selaku Likuidator Perseroan.

Para pihak yang mempunyai tagihan kepada Perseroan harap segera menyampaikan dan mendaftarkan tagihannya disertai dengan bukti hal tagihannya selambat-lambatnya 60 (enam puluh hari) sejak tanggal pengumuman ini kepada :

LEONARD MAMAHI
 Gedung Bursa Efek Indonesia,
 Tower 1, Lantai 27, Suite 2703,
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
 Telp. : (62-21) 515 4168
 Attn. **LEONARD MAMAHI**

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 31 Desember 2019
LIKUIDATOR

THE ANNOUNCEMENT OF LIQUIDATOR OF PT AON HEWITT INDONESIA Domiciled in Jakarta Selatan (the "Company")

Based on the Deed of Shareholders' Resolutions Statement In Lieu Of An Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT AON HEWITT INDONESIA, number 05, dated 16 December 2019, drawn up before Andriana Febyanti, S.H., Substitute Notary of Kanya Candrika Katrini, S.H., M.Kn., Notary in the City of Bekasi, the Company's Shareholders have resolved decisions, among other things are:

- To approve the dissolution and liquidation of the Company in accordance with the Company Law in Indonesia; and
- To resolve the appointment of Mr. Leonard Mamahit, having his address at Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, 27th Floor, Suite 2703, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, to acting as the Company's Liquidator.

Parties who have claim please immediately submit and register its claim including the evidence of its claim right at the latest 60 (sixty) days since this announcement date to:

LEONARD MAMAHI
 Gedung Bursa Efek Indonesia,
 Tower 1, 27th Floor, Suite 2703,
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
 Telp. : (62-21) 515 4168
 Attn. **LEONARD MAMAHI**

This announcement is made to meet the provision of Article 147 of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liabilities Companies.

Jakarta, December 31, 2019
LIQUIDATOR

PENGUMUMAN TENTANG HASIL PENGAMBILALIHAN

PT Uway Energi Perdana, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di The ST Moritz Lippo Puri, Jalan Puri Indah U1, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 11610 ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa **PT Forsa Tirta Gora, PT Forsa Tirta Uway, PT Tirta Uway Jaya, dan PT Hidup Besai Kemu** telah melakukan pengambilalihan atas seluruh saham Perseroan ("Penggambilalihan").

Pengambilalihan sebagaimana tersebut di atas telah dicatatkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0252468.AH.01.11. TAHUN 2019 tanggal 30 Desember 2019.

Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 31 Desember 2019

Direksi
PT Uway Energi Perdana

PENGUMUMAN

Direksi **PT. SARI BUMI KUSUMA**, berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya - Provinsi Kalimantan Barat ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan **AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. SARI BUMI KUSUMA**, tertanggal 23 Desember 2019 Nomor 252, yang dibuat dihadapan **JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**, Notaris di Jakarta Selatan, telah disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan untuk meningkatkan modal Perseroan dari sebelumnya berjumlah Rp. 51.500.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan serta disetor Perseroan dari sebelumnya berjumlah Rp. 31.500.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar Rupiah). Peningkatan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) penyetoran dilakukan dengan pelaksanaan Konversi Utang Obligasi Konversi Perseroan menjadi setoran saham dalam Perseroan.

Demikianlah Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan PP 15 tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Kubu Raya, 31 Desember 2019

Ttd
 Direksi